



Pola Operasi Penggilingan Padi Pasca Program Revitalisasi PPK Sumatera Barat

Donna Gracia Jorie¹⁾, Widya Fitriana²⁾, Endry Martius³⁾

Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Andalas

Corresponding author: donnagraciajorie80@gmail.com

Abstrak

Revitalisasi Penggilingan Padi Kecil (PPK) merupakan program strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok padi dan memperkuat posisi tawar petani. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola operasi penggilingan padi dengan adanya Program Revitalisasi PPK. Metode penelitian menggunakan survey *within case study* dengan pendekatan deskriptif kualitatif pada dua kelompok tani di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua pola operasi yang terbentuk: (1) Pola Operasi Integrasi Vertikal dan Horizontal pada PPK milik kelompok tani (Kelompok Tani Tanjung Mutiara), dimana kegiatan dari hulu sampai hilir terintegrasi dalam kelompok tani dan adanya Kerjasama antar unit usaha; dan (2) Pola Operasi Integrasi Vertikal Terbatas pada PPK milik anggota kelompok tani (Kelompok Tani Karakek Indah), dimana integrasi terbentuk karena salah satu tahapan produksi diintegrasikan ke kelompok tani dengan kewenangan yang terbatas. Program revitalisasi PPK memberikan perubahan pada keterlibatan para pihak, perubahan bentuk produk dari gabah menjadi beras, dan perluasan wilayah pemasaran hingga ke provinsi lain.

Kata kunci: Pola Operasi, Revitalisasi PPK, Integrasi Vertikal, Integrasi Horizontal, Kelompok Tani

Abstract

The Revitalization of Small Rice Mills (PPK) is a strategic program of the West Sumatra Provincial Government aimed at improving the efficiency of the rice supply chain and strengthening farmers' bargaining position. This study aims to describe the operational patterns of rice milling following the implementation of the PPK Revitalization Program. The research employed a survey within a case study design using a qualitative descriptive approach involving two farmer groups in Tanah Datar Regency and Pesisir Selatan Regency. The results show two emerging operational patterns: (1) a Vertical and Horizontal Integration Operational Pattern in farmer-group-owned PPK (Tanjung Mutiara Farmer Group), where upstream-to-downstream activities are integrated within the farmer group along with cooperation across business units; and (2) a Limited Vertical Integration Operational Pattern in PPK owned by individual farmer group members (Karakek Indah Farmer Group), where integration occurs because one stage of production is linked to the farmer group with limited authority. The PPK revitalization program has led to changes in stakeholder involvement, a shift in product form from unhusked paddy to rice, and expanded marketing areas reaching other provinces.

Key words: Operational Patterns, PPK Revitalization, Vertical Integration, Horizontal Integration, Farmer Groups

PENDAHULUAN

Padi merupakan komoditas pangan strategis yang menjadi makanan pokok dan sumber pendapatan utama bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik



Provinsi Sumatera Barat (2024) pada tahun 2024 luas panen padi di Sumatera Barat mencapai 295.279 hektare dengan produksi sebanyak 1.356.468 ton gabah kering giling (GKG). Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 1,76 persen dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 300.565 hektare dengan produksi 1.482.469 ton GKG. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan produktivitas padi yang berkelanjutan di wilayah Sumatera Barat.

Penggilingan padi merupakan titik sentral dalam agroindustri padi yang memiliki peranan vital dalam mengkonversi gabah menjadi beras yang siap dikonsumsi. Rachmat (2012) menegaskan bahwa penggilingan padi menjadi mata rantai penting dalam rantai pasok beras nasional. Namun demikian, berdasarkan data BPS tahun 2021, sebanyak 95,06 persen penggilingan padi di Indonesia merupakan penggilingan skala kecil dengan kapasitas di bawah 1.500 kg/jam. Penggilingan padi kecil (PPK) ini umumnya memiliki keterbatasan dalam hal teknologi, manajemen, akses permodalan, dan pasar sehingga kinerja operasionalnya belum optimal dan rendemen yang dihasilkan rata-rata hanya 62,28 persen, jauh di bawah standar ideal minimal 67 persen.

Sutarto Alimoeso, Ketua Umum Perpadi, sebagaimana dikutip dalam ANTARA News (2023) menyatakan bahwa revitalisasi penggilingan padi kecil dalam sistem perberasan nasional merupakan suatu keharusan untuk mengurangi kehilangan hasil panen dan meningkatkan kualitas, efisiensi, serta pendapatan petani. Permasalahan utama yang dihadapi PPK antara lain kapasitas mesin pengering (*dryer*) yang sangat terbatas, konfigurasi mesin yang kurang memadai, serta manajemen operasional yang belum sesuai standar. Akibatnya, beras yang dihasilkan masih terbatas pada kualitas medium dengan target pasar yang sempit.

Program revitalisasi PPK dilaksanakan sebagai upaya pemerintah dalam memperbaiki kinerja penggilingan padi kecil melalui beberapa fokus utama. Tani Tabloid Sinar Tani (2022) melaporkan bahwa revitalisasi mencakup perbaikan cara kerja penggilingan sesuai SOP dengan manajemen modern, penyediaan dryer untuk pengeringan yang optimal, serta perbaikan konfigurasi mesin dari husker-polisher menjadi cleaner-husker-separator-polisher-pengepakan. Di Provinsi Sumatera Barat, program revitalisasi PPK telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 521-1056-2022 yang menetapkan 73 kelompok tani sebagai penerima bantuan di 16 kabupaten/kota.

Efisiensi usahatani padi memiliki korelasi langsung dengan tingkat pendapatan petani. (Kusnadi et al (2011) dalam penelitiannya tentang efisiensi usahatani padi di beberapa sentra produksi menyimpulkan bahwa peningkatan efisiensi penggunaan input produksi akan berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan petani. Dengan adanya revitalisasi PPK, diharapkan rendemen beras dapat meningkat, kehilangan hasil (*losses*) dapat diminimalisir, dan kualitas beras yang dihasilkan menjadi lebih baik sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani padi di Sumatera Barat.

Penggilingan padi merupakan komponen penting dalam rantai pasok beras di Indonesia. Sebagai negara dengan konsumsi beras yang tinggi, efisiensi penggilingan padi menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Penggilingan Padi Kecil (PPK) yang tersebar di berbagai wilayah pedesaan memainkan peran strategis dalam mengolah gabah menjadi beras yang siap dikonsumsi masyarakat. Namun, banyak PPK yang sudah berusia lebih dari 10 tahun dan mengalami penurunan kinerja, rendemen rendah, serta menghasilkan beras yang kurang berkualitas.

Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung padi nasional memiliki banyak PPK yang memerlukan pembaruan teknologi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas



Pangan melaksanakan Program Revitalisasi PPK sebagai solusi untuk meningkatkan rendemen, kualitas, serta nilai ekonomis beras. Program ini dilakukan dengan mengganti dua komponen utama mesin penggilingan yaitu *Husker* (pemecah kulit gabah) dan *Polisher* (pemoles/pemutih beras) pada PPK milik kelompok tani atau anggota kelompok tani yang sudah tidak produktif.

Dengan adanya program revitalisasi PPK, diharapkan terjadi perubahan pada pola operasi penggilingan padi. Pola operasi penggilingan padi adalah serangkaian tindakan dan urutan kegiatan mulai dari pengadaan gabah, *processing* (penjemuran gabah, penggilingan, pengemasan), dan penjualan yang dilakukan oleh petani padi dan/atau kelompok tani. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola operasi penggilingan padi dengan adanya Program Revitalisasi PPK di Sumatera Barat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode survey *within case study* dengan pendekatan deskriptif kualitatif (*before-after*). Menurut Yin (2003) metode studi kasus sangat cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat *how* atau *why* mengenai suatu fenomena, terutama ketika peneliti ingin memahami secara mendalam dalam lingkungan aslinya. Lokasi penelitian dipilih secara *purposive* pada dua kelompok tani penerima bantuan Revitalisasi PPK di Provinsi Sumatera Barat, yaitu: (1) Kelompok Tani Tanjung Mutiara di Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar dengan PPK milik kelompok tani; dan (2) Kelompok Tani Karakek Indah di Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan dengan PPK milik anggota kelompok tani.

Responden pada Kelompok Tani Tanjung Mutiara berjumlah 24 orang yang merupakan seluruh anggota kelompok tani (*sensus*) dan pada Kelompok Tani Karakek Indah berjumlah 45 orang yang merupakan seluruh anggota kelompok tani (*sensus*), dengan total responde sebanyak 69 orang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan pola operasi penggilingan padi sebelum dan setelah program revitalisasi PPK.

Variabel yang diteliti untuk mendeskripsikan pola operasi penggilingan padi meliputi: (a) Keterlibatan para pihak, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam proses penggilingan dan keterkaitan antar pihak; (b) Perubahan bentuk produk, yaitu produk yang dihasilkan petani, fasilitas penyimpanan, dan biaya produksi tambahan; serta (c) Pemasaran, meliputi wilayah pemasaran dan akses pasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Program Revitalisasi PPK

Program Revitalisasi PPK merupakan terobosan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan melalui Dinas Pangan. Program ini bertujuan untuk: (1) mengembangkan potensi SDM dalam memanfaatkan sumber daya alam dan mensukseskan program swasembada pangan; (2) menggali sumber pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan petani; (3) mendukung program ketahanan pangan mandiri; dan (4) meningkatkan pendapatan petani dengan berkurangnya *losses* pada PPK. Sasaran program adalah PPK milik Kelompok Tani atau Gapoktan dan/atau milik anggotanya yang sudah berumur di atas 10 tahun dan/atau sudah tidak bernilai ekonomis. Berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat tahun 2022, terdapat 95 Gapoktan/Poktan/pemilik PPK calon penerima bantuan di seluruh kabupaten/kota.

3.2 Pola Operasi PPK Milik Kelompok Tani (Kelompok Tani Tanjung Mutiara)

Kelompok Tani Tanjung Mutiara memiliki PPK yang dikelola secara kolektif oleh kelompok tani dan menjadi usaha produktif sejak tahun 2013. Kelompok ini juga merupakan Lumbung



Pangan Masyarakat (LPM) yang aktif dalam pengelolaan cadangan pangan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perubahan signifikan pada pola operasi sebelum dan setelah program revitalisasi PPK.

1. Dari aspek keterlibatan para pihak, sebelum revitalisasi PPK, mayoritas responden (79,17%) hanya melibatkan petani dan pedagang gabah, dengan keterkaitan antar pihak didominasi penjualan ke pedagang gabah (87,50%). Setelah revitalisasi, terjadi pergeseran signifikan dimana 66,67% responden melibatkan petani, pemilik penggilingan, dan kelompok tani dalam operasinya, dengan 66,67% menjual produk ke kelompok tani. Kelompok tani berperan aktif membantu pemasaran beras ke pedagang dan konsumen serta membeli gabah/beras anggota untuk cadangan pangan.
2. Dari aspek perubahan bentuk produk, sebelum revitalisasi 91,67% responden hanya menghasilkan gabah dan tidak ada yang khusus menghasilkan beras. Setelah revitalisasi, terjadi transformasi dimana 37,50% responden menghasilkan beras dan 62,50% menghasilkan gabah dan beras. Seluruh responden (100%) kini memiliki akses ke fasilitas gudang penyimpanan yang disediakan kelompok. Biaya produksi tambahan juga meningkat dari 8,33% menjadi 100% responden karena proses pengolahan gabah menjadi beras memerlukan biaya angkut, jemur, giling, dan kemasan.
3. Perbandingan pendapatan menunjukkan bahwa responden yang menjual gabah memperoleh Rp 700.000/100 kg gabah, sedangkan yang menjual beras memperoleh Rp 1.000.900/100 kg gabah (setelah digiling dengan rendemen 65%). Terdapat selisih pendapatan sebesar Rp 300.900 per 100 kg gabah yang memberikan insentif bagi petani untuk mengolah gabah menjadi beras.
4. Dari aspek pemasaran, sebelum revitalisasi wilayah pemasaran terbatas di lingkungan sawah dengan penjualan langsung ke pedagang gabah. Setelah revitalisasi, 100% responden mengalami perluasan wilayah pemasaran. Akses pasar yang sebelumnya 87,50% dilakukan sendiri oleh petani, kini 54,17% melibatkan kelompok tani. Wilayah pemasaran beras bahkan meluas hingga ke Provinsi Riau dengan pengiriman rutin setiap minggu.

3.3 Pola Operasi PPK Milik Anggota Kelompok Tani (Kelompok Tani Karakek Indah)

Berbeda dengan Kelompok Tani Tanjung Mutiara, PPK pada Kelompok Tani Karakek Indah merupakan milik pribadi anggota kelompok tani yang dikelola secara individual. Pemilik PPK memberikan kontribusi berupa pengurangan upah giling kepada anggota kelompok tani, dimana anggota kelompok dibebankan upah giling 2 kg beras/30 kg beras yang digiling, sedangkan masyarakat umum dibebankan 3 kg beras/30 kg beras.

1. Dari aspek keterlibatan para pihak, sebelum revitalisasi 73,33% responden hanya melibatkan petani dan pedagang gabah. Setelah revitalisasi, terjadi diversifikasi dimana 71,11% responden melibatkan petani, pemilik penggilingan, pedagang gabah, dan pedagang beras. Namun, kelompok tani tidak terlibat langsung dalam hubungan integrasi kelembagaan petani. Seluruh responden (100%) tetap melakukan pemasaran secara mandiri.
2. Dari aspek perubahan bentuk produk, sebelum revitalisasi 73,33% responden menghasilkan gabah dan 24,44% menghasilkan gabah dan beras. Setelah revitalisasi, 84,44% responden menghasilkan beras dengan pertimbangan kualitas dan kuantitas beras yang dihasilkan lebih baik. Namun, 15,56% responden masih menghasilkan gabah karena keterbatasan modal usaha tani. Musim tanam di Nagari Kapeh Panji berlangsung 3-4 kali setahun sehingga kebutuhan modal berputar cepat.
3. Perbandingan pendapatan menunjukkan bahwa responden yang menjual gabah memperoleh Rp 650.000/100 kg gabah, sedangkan yang menjual beras memperoleh Rp 785.500/100 kg gabah dengan rendemen 65%. Selisih pendapatan sebesar Rp 135.500 per 100 kg gabah meskipun lebih rendah dari Kelompok Tani Tanjung Mutiara karena perbedaan harga jual beras varietas IR 42 (Rp 13.500/kg) dengan beras varietas kuriak



kusuik dan anak daro (Rp 17.000/kg).

4. Dari aspek pemasaran, setelah revitalisasi 71,11% responden mengalami perluasan wilayah pemasaran. Beras dipasarkan tidak hanya ke pedagang tetapi juga ke rumah makan di Kabupaten Pesisir Selatan, bahkan hingga ke Provinsi Bengkulu dan Provinsi Riau. Namun, seluruh akses pasar (100%) tetap dilakukan oleh petani secara mandiri tanpa melibatkan kelompok tani.

3.4 Perbandingan Pola Operasi: Integrasi Vertikal dan Horizontal vs Integrasi Vertikal Terbatas

Hasil penelitian menunjukkan terbentuknya dua pola operasi yang berbeda berdasarkan status kepemilikan PPK. Pada Kelompok Tani Tanjung Mutiara terbentuk Pola Operasi Integrasi Vertikal dan Horizontal. Integrasi vertikal terjadi karena penyatuan serangkaian tindakan dan tahap produksi dari hulu sampai hilir (budidaya, pengadaan gabah, pengolahan, hingga pemasaran) dalam satu garis lurus yang dikelola kelompok tani. Integrasi horizontal terjadi melalui kerjasama antar unit usaha yang selevel, yaitu antara PPK dengan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan antar kelompok tani sekitar dalam penyediaan gabah maupun beras.

Pada Kelompok Tani Karakek Indah terbentuk Pola Operasi Integrasi Vertikal Terbatas. Pola ini terjadi karena penyatuan terhadap beberapa tahapan produksi (dari hulu ke hilir), namun tidak secara menyeluruh dan masih menyisakan ruang bagi pihak eksternal. "Terbatas" merujuk pada batasan kepemilikan dan kontrol pada penggilingan padi. Karena PPK dimiliki oleh anggota kelompok secara pribadi, maka kontrol kelompok tani pada tahap pengolahan terbatas dan disesuaikan dengan kebutuhan pemilik penggilingan.

Perbedaan mendasar kedua pola operasi ini terletak pada peran kelompok tani dalam operasional PPK. Pada PPK milik kelompok, seluruh manfaat ekonomi dari program revitalisasi dapat dirasakan oleh semua anggota melalui mekanisme kelembagaan seperti Sisa Hasil Usaha (SHU), cadangan pangan kelompok, dan bantuan pemasaran. Sementara pada PPK milik anggota, manfaat lebih bersifat individual berupa pengurangan upah giling, tanpa kontribusi langsung terhadap perkembangan kelembagaan kelompok tani.

Faktor kelembagaan turut mempengaruhi pola operasi yang terbentuk. Kelompok Tani Tanjung Mutiara memiliki struktur pengurus yang jelas dengan fungsi ketua, sekretaris, dan bendahara yang berjalan efektif. Kelompok ini dibentuk sejak tahun 2011 dengan anggota yang relatif stabil dan pertemuan rutin. Sebaliknya, Kelompok Tani Karakek Indah meskipun memiliki struktur pengurus, namun fungsinya tidak berjalan efektif. Pergantian anggota cukup sering karena dominasi usia produktif yang mencari pekerjaan lain, dan pertemuan kelompok tidak dilakukan secara rutin.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Program Revitalisasi Penggilingan Padi Kecil (PPK) di Sumatera Barat membentuk dua pola operasi penggilingan padi yang berbeda berdasarkan status kepemilikan PPK. Pertama, Pola Operasi Integrasi Vertikal dan Horizontal pada PPK milik kelompok tani (Kelompok Tani Tanjung Mutiara), dimana seluruh tahapan dari budidaya hingga pemasaran terintegrasi dalam kelompok tani dan terbentuknya kerjasama antar unit usaha yang selevel. Kedua, Pola Operasi Integrasi Vertikal Terbatas pada PPK milik anggota kelompok tani (Kelompok Tani Karakek Indah), dimana integrasi hanya terjadi pada beberapa tahapan produksi dengan kontrol terbatas dari kelompok tani. Program revitalisasi PPK memberikan perubahan pada ketiga aspek pola operasi: (1) Keterlibatan para pihak meningkat dengan masuknya kelompok tani dan diversifikasi pedagang; (2) Perubahan bentuk produk dari dominan gabah menjadi beras dengan nilai jual lebih tinggi; dan (3) Perluasan wilayah pemasaran hingga ke provinsi lain. Rekomendasi dari penelitian ini adalah program revitalisasi PPK sebaiknya diprioritaskan pada PPK milik kelompok tani untuk memaksimalkan dampak terhadap kelembagaan dan kesejahteraan seluruh anggota kelompok.



SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat ada perbedaan cara kerja penggilingan padi (PPK) setelah program revitalisasi. PPK milik kelompok tani cenderung menjalankan usaha dengan integrasi vertikal dan horizontal (mengelola dari pengadaan gabah sampai pemasaran, serta bekerja sama/berjejaring dengan pihak lain). Sementara itu, PPK milik anggota individu umumnya hanya menjalankan integrasi vertikal terbatas (kegiatan masih terbatas pada proses tertentu saja). Karena perbedaan ini, pemerintah disarankan membuat strategi revitalisasi yang berbeda sesuai kondisi masing-masing jenis PPK, agar programnya tepat sasaran. Selain itu, untuk mengurangi dampak negatif dari “kesenjangan” pola operasi tersebut, perlu dibentuk lembaga penghubung (*bridging institution*) yang mendorong kerja sama antara kelompok tani dan pemilik PPK individu, misalnya melalui pengadaan gabah bersama, berbagi teknologi, serta membuka akses pasar secara kolektif

DAFTAR PUSTAKA

- ANTARA News. (2023). *Asosiasi minta pemerintah segera revitalisasi penggilingan padi kecil.* ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/3485277>
- Aritonang, L. R. (2013). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani dalam Sistem Agribisnis. *Jurnal Pertanian*, 4(2), 78–92.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. (2024). *Luas Panen dan Produksi Padi di Provinsi Sumatera Barat 2024.*
- Hayami, Y. (1987). *Agricultural Marketing and Processing in Upland Java: A Perspective from a Sunda Village.* CGPRT Centre.
- Kusnadi, N., Tinaprilla, N., Susilowati, S. H., & Purwoto, A. (2011). Analisis Efisiensi Usahatani Padi di Beberapa Sentra Produksi Padi di Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*, 29(1), 25–48.
- Rachmat, R. (2012). *Penggilingan Padi: Ketersediaan dan Kinerja.* : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian.
- Saragih, B. (2010). *Agribisnis: Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian.* IPB Press.
- Setiawan, R. (2021). Dampak Revitalisasi Penggilingan Padi Terhadap Nilai Tambah Petani. *Jurnal Pertanian Indonesia*, 18(2), 120-130.
- Soekartawi. (2002). *Analisis Usahatani.* UI Press.
- Somantri, A. S., & Luna, M. (2020). Strategi Revitalisasi Penggilingan Padi Kecil melalui Penguatan Kelembagaan. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 8(1), 34–48.
- Tani, T. S. (2022). *Revitalisasi Penggilingan Padi, Dongkrak Kualitas Beras Dalam Negeri.* Tabloid Sinar Tani. <https://tabloidsinartani.com>
- Thahir, R. (2009). Teknologi Pascapanen Padi untuk Mendukung Ketahanan Pangan. *Jurnal Pangan*, 18(2), 15–28.
- Williamson, O. E. (1985). *The Economic Institutions of Capitalism.* Free Press.
- Yin, R. K. (2003). *Case Study Research: Design and Methods* (3rd ed). Sage Publications.